

Transformasi Kelembagaan Desa melalui Model Kolaborasi Internasional dan Digital Governance di Terengganu, Malaysia

Rahyunir Rauf^{1*}, Sri Maulidiah², Norsuhaily³, Nina Yuslaini⁴,
Muhammad Hafizh Rahyunir⁵

^{1,2,4,5} Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

³ Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia

Email Korespondensi: rahyunir.ip@soc.uir.ac.id

Email: srimaulidiah@soc.uir.ac.id, norsuhaily@unisza.edu.my,

ninayuslaini@soc.uir.ac.id, mhafizhrahyunir@soc.uir.ac.id

Abstract

The purpose of the Community Service (PKM) activity is to address the challenges faced by village institutions (LKD), including limited human resource capacity of LKD, low community participation in development, limited infrastructure, weak synergy between institutions, and minimal financial support. The method uses Rapid Rural Appraisal (RRA), Capacity Building, Collaborative Governance, Asset Based Community Development (ABCD) with activity stages namely initial survey, socialization, counseling, training, monitoring evaluation, and program sustainability. The results of the activity show an increase in the capacity of LKD members by 76% based on the results of pre-test and post-test evaluations, especially in aspects of organizational management and village development planning. In addition, the level of community participation in development deliberation forums increased from 58% to 87% after the program implementation. This activity also succeeded in building multi-stakeholder collaboration between the village government, LKD, the community, universities, and external parties such as CSR and non-governmental organizations (NGOs). However, program implementation still faces obstacles such as limited mentoring time, low adaptability of some LKD members to sustainable development concepts, and limited budget support for village programs. Therefore, ongoing mentoring and strengthening of village communication forums as cross-actor coordination spaces are needed to support participatory and sustainable village governance. These findings suggest that a collaborative governance approach based on strengthening institutional capacity can be a strategic model for supporting sustainable village development.

Keywords: *Collaboration, Capacity Building; LKD; Sustainable Development; Terengganu*

Abstrak

Tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan untuk menjawab tantangan yang dihadapi kelembagaan desa (LKD) antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia LKD, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, keterbatasan infrastruktur, lemahnya sinergi antar lembaga, dan minimnya dukungan pembiayaan. Metode menggunakan Rapid Rural Appraisal (RRA), Capacity Building, Collaborative Governance, Asset Based Community Development (ABCD) dengan

tahapan kegiatan yaitu survey awal, sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, monitoring evaluasi, dan keberlanjutan program. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas anggota LKD sebesar 76% berdasarkan hasil evaluasi pre-test dan post-test, terutama dalam aspek manajemen organisasi dan perencanaan pembangunan desa. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan meningkat dari 58% menjadi 87% setelah pelaksanaan program. Kegiatan ini juga berhasil membangun kolaborasi multipihak antara pemerintah desa, LKD, masyarakat, perguruan tinggi, serta pihak eksternal seperti CSR dan organisasi non-pemerintah (NGO). Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan waktu pendampingan, rendahnya kemampuan adaptasi sebagian anggota LKD terhadap konsep pembangunan berkelanjutan, serta terbatasnya dukungan anggaran program desa. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan berkelanjutan dan penguatan forum komunikasi desa sebagai ruang koordinasi lintas aktor dalam mendukung tata kelola desa yang partisipatif dan berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan collaborative governance berbasis penguatan kapasitas kelembagaan dapat menjadi model strategis dalam mendukung pembangunan desa berkelanjutan.

Kata Kunci: *Kolaborasi, Penguatan Kapasitas, Pembangunan Berkelanjutan, Terengganu*

Pendahuluan

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu tugas utama pemerintah yang bersifat kompleks (Syukri, 2024). Kompleksitas tersebut muncul karena dua faktor utama yaitu : jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan setiap tahun sehingga berdampak pada peningkatan kebutuhan masyarakat, dan dinamika sosial yang semakin berkembang sehingga menuntut responsivitas pelayanan yang lebih tinggi (Ginting et al., 2023, 2024). Kondisi ini semakin diperberat dengan keterbatasan jumlah aparatur pemerintah yang tersedia untuk menjalankan fungsi pelayanan (Ardiputra et al., 2025; Maulidiah et al., 2024). Oleh sebab itu, pemerintah tidak dapat bekerja secara tunggal, melainkan memerlukan dukungan dan keterlibatan aktif dari kelembagaan desa seperti Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disingkat LKD (Entsminger et al., 2025; Perrini et al., 2020).

Lembaga LKD merupakan mitra pemerintah desa yang membantu dalam penyelenggaraan pemerintah desa, LKD didirikan atas inisiatif masyarakat desa yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat desa (Goessling, 2020). Dalam membantu pemerintah desa bentuk tugas yang dilaksanakan berupa penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, dan pemberdayaan Masyarakat (Renukappa et al., 2022; Sabet & Khaksar, 2024). Dalam pelaksanaan tugas tersebut LKD diberikan fungsi yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan, berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan (perumusan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian) (Eriksen, 2020; Ojiako et al., 2024). seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan. Jenis lembaga kemasyarakatan terdiri dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) (Nor et al., 2022; Rauf et al., 2024).

Meskipun teori mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) menempatkan lembaga ini sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat,

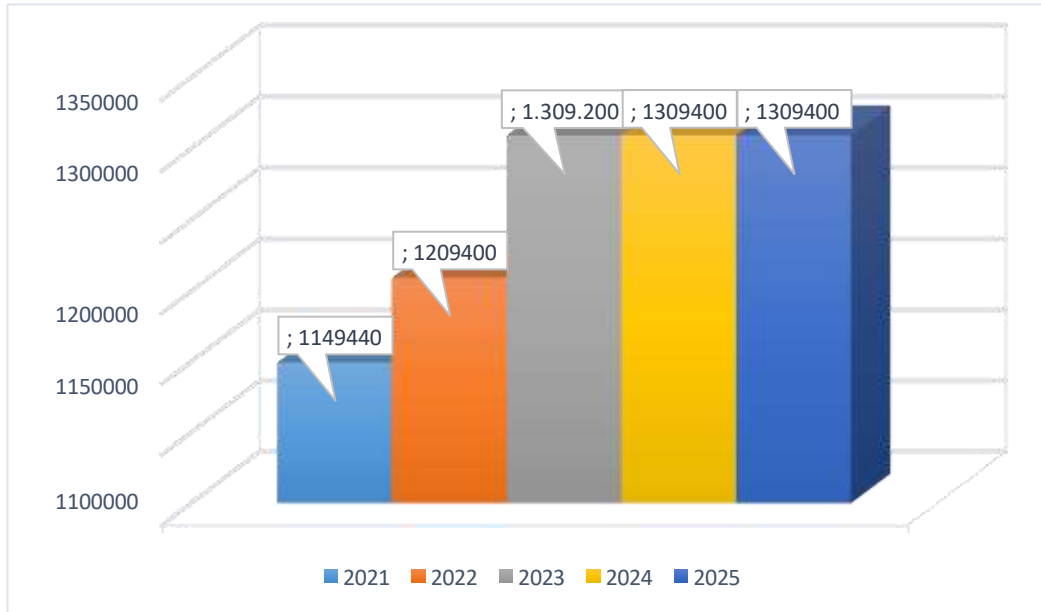
pendekatan tersebut masih cenderung normatif dan administratif. Regulasi seperti Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 lebih banyak menjelaskan fungsi formal dan struktur kelembagaan LKD, namun belum secara mendalam menjelaskan bagaimana kapasitas kelembagaan, relasi kekuasaan, dan dinamika partisipasi masyarakat memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut. Dengan kata lain, teori ini masih berorientasi pada “apa yang seharusnya dilakukan” (*normative approach*), bukan pada “bagaimana fungsi tersebut benar-benar berjalan” dalam praktik sosial masyarakat desa.

Selain itu, konsep LKD sebagai lembaga yang dibentuk atas inisiatif masyarakat desa sering kali tidak sepenuhnya terjadi secara partisipatif. Dalam praktiknya, pembentukan dan operasionalisasi LKD masih sangat dipengaruhi oleh pemerintah desa dan elite lokal, sehingga independensi lembaga dalam menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep *community-based institution* dengan realitas tata kelola desa yang masih bersifat *top-down*. Kritik ini sejalan dengan perspektif *participatory governance* yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sering kali bersifat simbolik dan belum sepenuhnya memberikan ruang pengambilan keputusan yang substantif kepada masyarakat desa.

Jika dicermati terkait hakikat, tugas dan fungsi bahwa jelas jika LKD posisinya berada ditengah-tengah masyarakat yang memposisikan diri sebagai mitra pemerintah desa (Andrews et al., 2020). Secara empirik pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh LKD seperti penanganan kasus dan konflik dalam lingkungan masyarakat yang harus di selesaikan atau di mediasi oleh LKD (Pangbourne et al., 2020). Kasus dan konflik yang terjadi dapat berupa konflik personal dengan personal maupun kelompok dengan kelompok (Humaedi et al., 2025). Dicontohkan seperti kasus rumah tangga, hubungan antar tetangga, batas wilayah, masalah persampahan, kenakalan remaja, dan kasus gangguan keamanan (Kabadayi et al., 2020).

Dibutuhkan profesionalitas dan kompetensi bagi LKD dalam melaksanakan tugas yang diberikan (Remillard et al., 2022). Namun pada praktiknya secara umum kedudukan LKD masih lemah baik secara struktur, kelembagaan maupun secara personal dalam melaksanakan Pembangunan desa berkelanjutan (Chapman, 2024). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, penguatan LKD mampu mendorong percepatan perekonomian desa melalui pemanfaatan potensi desa berdasarkan kearifan lokal yang selaras dengan SDGs desa (Ng & Wong, 2022; Rosenbloom et al., 2022).

Berkaitan isu LKD tidak hanya menjadi pembahasan di Indonesia tetapi juga menjadi isu secara global pada negara lainnya seperti di negara Malaysia. Negara Bagian Terengganu merupakan sebuah negara bagian di bawah pemerintahan Negara Malaysia yang jumlah penduduknya terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir, meskipun pada tahun 2023-2025 peningkatan penduduk tidak signifikan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini:



Gambar.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Negara Bagian Terengganu, Malaysia Tahun 2021-2025.

Negara Bagian Terengganu berada di pesisir pantai timur Semenanjung Malaysia, terkenal dengan keberagaman hayati lautnya, karena memiliki Pantai yang memukau yang dijadikan sebagai objek wisata alam seperti Pulau Redang, ekowisata resort tepai pantai, dapat dilihat gambar 2. Untuk pemanfaatan potensi desa tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja di butuhkan keterlibatan dari *stake holders* seperti LKD, Masyarakat, dan Swasta.



Gambar 2. Kunjungan Tim PKM ke Pulau Redang, Terengganu Berdasarkan kondisi eksisting terkait LKD di Negara Bagian Terengganu, Malaysia diidentifikasi permasalahan yang bersifat umum sebagai berikut:

1. Kapasitas SDM LKD yang masih terbatas dalam melaksanakan tugas dan

fungsi sebagai mitra pemerintah desa.

2. Kurangnya koordinasi dan sinergitas antara LKD dengan pemerintah desa, sehingga program pemerintah desa belum terintegrasi dengan efektif.
3. Masih rendahnya partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di perdesaan.
4. Keterbatasan akses teknologi dan informasi sehingga LKD sulit untuk mengembangkan inovasi berbasis digital.
5. Keterbatasan pendanaan dan sarana dan prasarana sehingga aktivitas LKD kurang optimal.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh LKD di Negara Bagian Terengganu, adapun solusi yang direkomendasikan dapat dilihat pada gambar 3 berikut:



Gambar 3. Bagan alir antara permasalahan, solusi, dan luaran kegiatan PKM Kegiatan PKM ini dilakukan dengan beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu

sebagai berikut:

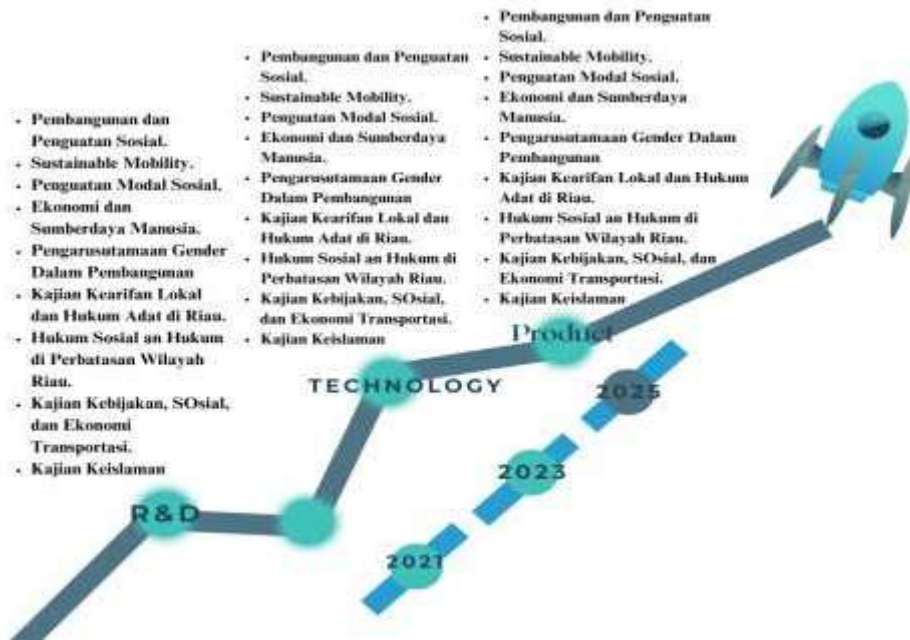
1. Meningkatkan kapasitas Sumber daya manusia (SDM) LKD.
2. Membangun sinergi dan koordinasi antara LKD dengan pemerintah dan Masyarakat desa.
3. Mendorong partisipasi aktif Masyarakat dalam Pembangunan perdesaan secara berkelanjutan.
4. Mengembangkan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi kelembagaan desa sebagai sarana untuk meningkatkan akses informasi.
5. Menciptakan sumber pendanaan alternatif dan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana.

Selain tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan PKM ni diharapkan memberikan dampak secara signifikan kepada terhadap LKD khususnya, selanjutnya kepada pemerintah desa dan Masyarakat umumnya, adapun dampaknya sebagai berikut:

1. LKD memiliki kompetensi yang lebih baik dalam manajemen organisasi, serta pengelolaan program Pembangunan.
2. Terciptanya system kelembagaan desa yang lebih bersinergi dan kolaboratif.
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan desa.
4. Terbentuknya jejaring ekonomi desa yang lebih kuat.
5. Terbentuknya penguatan kelembagaan desa yang efektif dalam mempercepat pembangunan desa berkelanjutan di Negara Bagian

Terengganu.

Kegiatan PKM ini dilakukan dalam upaya realisasi program kegiatan bidang penelitian dan pengabdian masyarakat dalam Renstra UIR 2021-2025 yang berfokus pada SDGs terkait tema Sosial Humaniora bidang Ekonomi dan Sumberdaya Manusia dapat dilihat pada gambar 4 berikut.



Gambar 4. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) UIR Kegiatan PKM terdahulu telah banyak melakukan kegiatan terkait

kelembagaan desa, dari hasil analisis aplikasi *connected papers* dengan melihat thematic map yang dilakukan pencarian dengan kata kunci “Kelembagaan Desa; Pembangunan Desa; Berkelanjutan;”, dapat dilihat gambar 4.

Title	Authors	Year	Clusters	References	Similarity to target
PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BANGUN GLOBAL PRESTASI DALAM MENINGKATKAN KESELAMATAN MASYARAKAT...	Wanda Nurrah, Sabaliah Sabaliah, dan Syarifuddin Daudy	2024	0	73	0.0
PERSEKUTIP MAGASHEB SYARIAH IBNU ADHUR DALAM AKUNTANSI MURABAHAH DALAM MELIDHE PENGALAMAN KESUNTUNGAN	P. Setiawan, Ihsan Akmal Nurudin, Dan Lailani Rina Raha Haris, M. Alimuddin, Dan Lailani	2023	7	0	10.4
Audit Operasional untuk Mengukur Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Investasi Pada Dana Perisyan RBT	Fatah Alrifal Kurniawan, Y. Subandhi, Dan Inayati Rahmawati	2023	0	10	0.0
Pendampingan Pencatatan Transaksi Keuangan Untuk BUMdes Pada Bumbes Melalui Desa Capagato, Kecamatan Begongcong	Heri Harto Wicakno, D. P. A. Mahendras, Dan Rina Purwati	2023	0	70	0.0
DOES FINANCIAL LITERACY AND INCLUSION AFFECT VILLAGE OWNED ENTERPRISES FINANCIAL PERFORMANCE	N. S. Kuchal, Triyana, Arifni Fitri Andriani, Perlembih Kurnegar, Nopika Sita	2023	0	54	0.1
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mina Pita dalam Meningkatkan Tarif Perikanan Masyarakat Desa Getas, Kecamatan Bikon...	Krisnandya, Indarandura Sari, Apriana Pita, Nurfarida Nurfarida	2023	0	0	0.0
Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengembangkan Potensi Desa Melalui Wisata Edukasi Kampung Naras	Muzhar Hasan Rini, Ahmad Ridwan Murnyati, Dan Hidayatun Nuzuli, Mulyandari Dan Hidayatun	2024	0	0	0.0
Pembinaan Koneksi dan Pemanfaatan Fitur Live Streaming Untuk Pemasaran Usaha di Desa Cikurup, Jawa Barat	M. Nanda	2023	0	0	0.0
Pengabdian Potensi Berkelembagaan Desa Melalui Pemasaran Perikanan Berkelembagaan Desa Berkelembagaan	Fanni Pratiwi Daryun, Dan Daryun Daryun	2023	0	0	700
STRATEGI PEMASARAN (4P'S YOU & ME SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2022	Rubiana Subandhi, Endang Mulyanti, Dan Rina Raha Haris, Dan Rina Raha Haris	2023	0	0	10.0
PENERAPAN PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG) DESA POLEWALI DALAM MENURUNKAN KEMISKINAN	Adi Nugroho, S. Supriatno, Dan Jurny Jurny	2023	33	0	0.0

Gambar 4. Thematic Map

Berdasarkan hasil analisis diatas terlihat bahwa artikel terkait kelembagaan desa publikasi tahun 2022-2024 pada jurnl nasional masih terus dilakukan namun sedikit artikel yang membahas topik penguatan kelembagaan desa dalam

pembangunan desa lingkup internasional. Berdasarkan permasalahan, tujuan, dampak dan *literature review* maka perlu dilakukan kegiatan PKM yang bersifat kolaborasi dengan tema penguatan kelembagaan desa menuju Pembangunan desa berkelanjutan di Negara Bagian Terengganu, Malaysia.

Metode Pengabdian

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang diintegrasikan dengan konsep community empowerment, capacity building, dan collaborative governance. Integrasi pendekatan tersebut digunakan untuk membangun model penguatan kelembagaan desa yang partisipatif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Secara konseptual, pendekatan pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa sebagai subjek utama pembangunan, sedangkan capacity building diarahkan untuk meningkatkan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia kelembagaan desa. Sementara itu, pendekatan collaborative governance digunakan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan mitra internasional dalam mendukung pembangunan desa berkelanjutan (Afnan et al., 2025; Pedersen et al., 2022).

Kegiatan PKM dilaksanakan di Negara Bagian Terengganu, Malaysia, dengan melibatkan 40 partisipan yang terdiri atas perangkat pemerintah lokal, lembaga kemasyarakatan desa (LKD), tokoh masyarakat, pemuda, akademisi, dan mitra internasional dari Nurul Iman Malaysia. Pemilihan partisipan dilakukan secara purposive berdasarkan keterlibatan mereka dalam aktivitas pembangunan masyarakat dan penguatan kelembagaan desa.

Kegiatan PKM yang dilakukan menggunakan metode yang berlandaskan pada teori pemberdayaan Masyarakat yang menekankan partisipasi, kemandirian, dan keberlanjutan (Afnan et al., 2025; Pedersen et al., 2022). Beberapa pendekatan tersebut dapat dilihat gambar 5 berikut.



Gambar 5. Metode kegiatan PKM

Supaya kegiatan PKM terlaksana secara efektif dan sesuai dengan target yang telah ditentukan, maka di tetapkan tahapan kegiatan PKM yang dapan dilihat pada gambar 6 berikut:



Gambar 6. Tahapan kegiatan PKM

Keberhasilan kegiatan PKM ini tidak terlepas dari partisipasi mitra terutama pada pemerintah Negara Bagian Terengganu, Nurul Iman, Malaysia, bentuk partisipas dapat dilihat pada gambar 7 berikut.



Gambar 7. Partisipasi Mitra Dalam Kegiatan PKM

Hasil dan Pembahasan

Hasil survei awal menunjukkan bahwa kelembagaan desa di Terengganu memiliki potensi sosial yang kuat, terutama dalam aspek gotong royong dan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Namun demikian, ditemukan beberapa kendala utama, yaitu rendahnya kapasitas manajerial kelembagaan, terbatasnya pemahaman mengenai tata kelola pembangunan berkelanjutan, serta belum optimalnya kolaborasi antara lembaga masyarakat dan pemerintah lokal. Temuan ini menjadi dasar penyusunan program penyuluhan dan pelatihan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan mitra.

Pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas peserta dalam aspek manajemen organisasi dan tata kelola pembangunan desa. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, tingkat pemahaman peserta terkait manajemen kelembagaan meningkat sebesar 74%, sedangkan pemahaman mengenai prinsip good governance dan pembangunan berkelanjutan meningkat sebesar 69%. Selain itu, tingkat partisipasi peserta dalam forum diskusi dan musyawarah meningkat dari 61% menjadi 88% selama kegiatan berlangsung.

Pada aspek kolaborasi kelembagaan, kegiatan PKM berhasil membangun komunikasi dan koordinasi antara pemerintah lokal, LKD, kelompok masyarakat, dan perguruan tinggi. Kolaborasi ini menghasilkan penyusunan rencana tindak lanjut berupa forum komunikasi lintas aktor dan pengembangan program pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi kreatif lokal. Salah satu bentuk implementasi program terlihat melalui kunjungan dan pendampingan terhadap kelompok kerajinan batik berbasis kearifan lokal sebagai upaya penguatan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.

a. Gambaran Lokasi Kegiatan dan Mitra

Kegiatan PKM ini dilaksanakan di Negara Bagian Terengganu Darul Iman, Malaysia, yang berkolaborasi dengan Universiti Sultan Zainal Abidin (UNiSZA) Malaysia, dengan mitra sasaran yaitu Pemerintah Desa, LKD, dan Masyarakat.

b. Teknis Pelaksanaan

Kegiatan ini merupakan kegiatan PKM kolaborasi internasional antara Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) Universitas Islam Riau (UIR) dengan Fakultas Sains Social Gunaan (FSSG) Universiti Sultan Zainal Abidin (UNiSZA) Malaysia. Kegiatan ini dilaksanakan selama empat hari yaitu dari Tanggal 4-10 Oktober 2024. Secara teknis kegiatan ini terdiri dari tahapan survei, sosialisasi, penyuluhan, pelatihan monitoring evaluasi, dan keberlanjutan program. Adapun tahapan di jelaskan sebagai berikut.

Tim PKM melakukan pengumpulan data dan informasi terkait kondisi awal LKD di Terengganu. Kegiatan yang dilakukan meliputi: observasi lokasi bersama tim UNiSZA untuk mengetahui potensi dan permasalahan yang ada, wawancara bersama mitra terkait kendala yang mereka hadapi, dan analisis kebutuhan untuk menentukan solusi yang tepat dalam program PKM, dapat dilihat pada gambar 8 berikut.



Gambar 8. Survei dan Kunjungan Tim PKM ke Kampus UniSZA

Setelah survei awal, Tim PKM melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa, LKD, Kelompok Masyarakat Lambo Sari, dan mahasiswa tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada tahapan ini sosialisasi yang disampaikan berkaitan; (1) Penyampaian tujuan dan manfaat dari program PKM, (2) Diskusi bersama LKD untuk mendapatkan masukan dan menyepakati kegiatan yang akan dilakukan, dapat dilihat pada gambar 9 berikut.



Gambar 9. Sosialisasi kegiatan oleh Tim PKM

Tahapan selanjutnya Tim PKM melakukan penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kelembagaan desa dengan menyampaikan materi terkait keberadaan dan penguatan kelembagaan desa (LKD) menuju pembangunan desa berkelanjutan. Setelah melakukan penyuluhan Tim PKM melakukan kegiatan pelatihan kepada pemerintah desa, LKD, dan kelompok masyarakat. Materi pelatihan yang diberikan yaitu : 1). Manajemen keorganisasian LKD, 2). Strategi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, 3). *Good Governance* menuju pembangunan desa berkelanjutan, dapat dilihat pada gambar. 10 berikut:



Gambar 10. Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan LKD di Terengganu

Setelah melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pelatihan Tim PKM melakukan kunjungan kepada kelompok kerajinan Masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi kreatif produksi batik berbasis kearifan lokal, dapat dilihat gambar 11 berikut.



Gambar 11. Kerajinan Produksi Batik Kelompok Masyarakat Lambo Sari, Terengganu

c. Target Kegiatan

Kegiatan PKM yang dilakukan memiliki beberapa target yang telah ditetapkan. Target yang diharapkan yaitu bagaimana kegiatan yang dilakukan dapat membantu meningkatkan kapasitas LKD dalam pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya target secara umum dijelaskan sebagai berikut:

1. LKD mengikuti pelatihan manajemen organisasi dan perencanaan pembangunan, Strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan, dan *Good Governance* dalam pembangunan desa berkelanjutan.

2. Adanya forum komunikasi terbentuk antara pemerintah desa, LKD, masyarakat, dan Perguruan Tinggi dalam menyusun perencanaan pembangunan desa.
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan desa.
4. Terjalannya hubungan kerja sama dengan pemangku kepentingan seperti CSR, NGO untuk mendukung pendanaan dan pengembangan program desa.

d. Ketercapaian Kegiatan

Ketercapaian kegiatan PKM yang dilakukan dapat dilihat pada hasil yang telah dicapai kemudian dibandingkan dengan target awal yaitu sebagai berikut:

1. Anggota LKD menunjukkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen organisasi dan perencanaan.
2. Adanya pembentukan forum komunikasi tingkat desa, dan menetapkan agenda kolaboratif.
3. Partisipasi masyarakat meningkat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, dengan adanya keterwakilan perempuan dan pemuda.
4. Terjalannya kerja sama dengan pihak eksternal seperti CSR, NGO, dan Perguruan Tinggi.

e. Kendala Pelaksanaan

Pada kegiatan PKM yang dilaksanakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Tim PKM dalam peningkatan Kapasitas LKD, yaitu sebagai berikut:

1. Keterbatasan LKD dalam memahami dan beradaptasi dengan konsep pembangunan desa berkelanjutan yang di realisasikan dalam perencanaan pembangunan.
2. Waktu pelaksanaan kegiatan yang relatif singkat sehingga bentuk kegiatan hanya bisa dilakukan berupa kegiatan penyuluhan dan pelatihan sederhana saja yang semestinya jika dilihat dari permasalahan yang dialami oleh peserta penyuluhan sebagai solusi sebaiknya dilakukan kegiatan pelatihan secara intens.
3. Keterbatasan anggaran yang di alokasikan untuk kegiatan PKM sehingga belum sepenuhnya mampu mengakomodasi pelaksanaan kegiatan, namun secara umum biaya yang di alokasikan sudah dianggap sesuai.

f. Rencana Tindak Lanjut

Setelah dilakukannya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah berlangsung, agar program ini tetap berjalan dan berkembang maka perlu dilakukan beberapa langkah tindak lanjut:

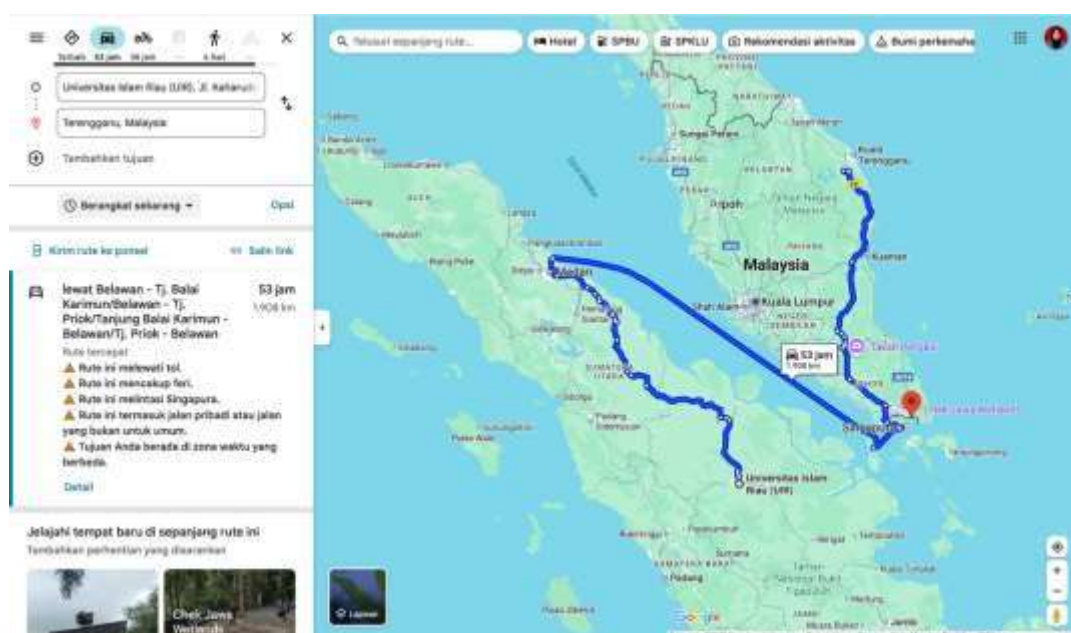
1. Melakukan *mentoring dan coaching* secara intens kepada LKD.
2. Menetapkan forum komunikasi desa sehingga bisa menjadi wadah koordinasi dan kolaborasi lintas aktor.
3. Memperluas dan memperkuat program unggulan desa seperti usaha ekonomi desa.

g. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau (UIR) yang telah mendukung dan membiayai kegiatan PKM.
2. DPPM UIR yang telah menjadi motor penggerak dalam pelaksanaan kegiatan ini.
3. Tim PKM Fakultas Sains Social Gunaan (FSSG) Universiti Sultan Zainal Abidin (UNiSZA) Malaysia yang telah fasilitasi kegiatan ini.
4. Pemerintah desa, LKD, Kelompok Masyarakat, dan Mahasiswa Terengganu, Malaysia.
5. Tim PKM Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) Universitas Islam Riau yang telah bekerja keras dan berkomitmen tinggi untuk kesuksesan kegiatan PKM ini.

h. Peta Lokasi Kegiatan



Gambar 11. Peta Lokasi Kegiatan PKM di Terengganu, Malaysia

Simpulan

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Penguatan Kelembagaan Desa di Negara Bagian Terengganu, Malaysia menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan berbasis collaborative governance mampu meningkatkan efektivitas tata kelola desa menuju pembangunan berkelanjutan. Hasil kegiatan memperlihatkan adanya peningkatan kapasitas peserta dalam aspek manajemen kelembagaan dan tata kelola pembangunan sebesar 74%, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum pembangunan desa dari 61% menjadi 88% setelah pelaksanaan program. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan tidak hanya berdampak pada peningkatan kemampuan administratif, tetapi juga mampu memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Kontribusi utama program ini terletak pada penerapan model penguatan kelembagaan desa yang mengintegrasikan pendekatan capacity building,

participatory governance, dan kolaborasi multipihak antara pemerintah lokal, perguruan tinggi, masyarakat, serta mitra eksternal seperti CSR dan NGO. Model ini menjadi kebaruan program karena tidak hanya berfokus pada pelatihan teknis, tetapi juga membangun jejaring kolaboratif dan forum komunikasi lintas aktor sebagai strategi keberlanjutan pembangunan desa.

Secara teoretis, hasil kegiatan memperkuat perspektif pembangunan partisipatif yang menempatkan kelembagaan lokal sebagai aktor utama dalam menciptakan tata kelola desa yang inklusif dan adaptif. Sementara itu, secara praktis program ini memberikan implikasi bahwa penguatan kelembagaan desa akan lebih efektif apabila dilakukan melalui pendampingan berkelanjutan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan integrasi jejaring kemitraan lintas sektor.

Daftar Pustaka

- Afnan, D., Wijaya, M., Kartono, D. T., & Wibowo, A. (2025). Community empowerment model in the refuse-derived fuel waste management program in Indonesia. *Cleaner Waste Systems*, *12*, 100364. <https://doi.org/10.1016/j.clwas.2025.100364>
- Andrews, R., Ferry, L., Skelcher, C., & Wegorowski, P. (2020). Corporatization in the public sector: Explaining the growth of local government companies. *Public Administration Review*, *80*(3), 482–493. <https://doi.org/10.1111/puar.13052>
- Ardiputra, S., Milyan, M., Akhmad, Z., Sulthan, M., & Ardiputra, M. A. (2025). Optimizing budget policy in village fund allocation (ADD): A governance and public administration perspective on rural development. *Frontiers in Political Science*, *7*, 1581806. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1581806>
- Chapman, B. (2024). *The profession of government: The public service in Europe*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003487357>
- Entsminger, J., Green, J. J., Wiatt, R., & Bednarik, Z. (2025). Multi-method research in the digital age: A methodological case study of a broad-scale rapid rural appraisal. *Community Development*, *56*(5), 669–688. <https://doi.org/10.1080/15575330.2024.2438011>
- Eriksen, A. (2020). Accountability and the multidimensional mandate. *Political Research Quarterly*, *74*(2), 364–376. <https://doi.org/10.1177/1065912920906880>
- Ginting, A. H., Widianingsih, I., Mulyawan, R., & Nurasa, H. (2023). Village government's risk management and village fund administration in Indonesia. *Sustainability*, *15*(24), 16706. <https://doi.org/10.3390/su152416706>
- Ginting, A. H., Widianingsih, I., Mulyawan, R., & Nurasa, H. (2024). Village fund program in Cibeureum and Sukapura Village, Bandung Regency, Indonesia: Problems, risks, and solutions. *Cogent Social Sciences*, *10*(1), 2303452. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2303452>
- Goessling, K. P. (2020). Youth participatory action research, trauma, and the arts: Designing youth spaces for equity and healing. *International Journal of*

- Qualitative Studies in Education*, 33(1), 12–31.
<https://doi.org/10.1080/09518398.2019.1678783>
- Humaedi, M. A., Wibowo, D. P., Hariyanto, W., Susilo, S. R. T., Wijayanti, F., Hakim, F. N., Martino, M., Wijaya, G., Andari, R. N., Yumantoko, Y., & Tessa, A. (2025). Shifting collective values: The role of rural women and gotong royong in village fund policy. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 411. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04577-6>
- Kabadayi, S., O'Connor, G. E., & Tuzovic, S. (2020). Viewpoint: The impact of coronavirus on service ecosystems as service mega-disruptions. *Journal of Services Marketing*, 34(6), 809–817. <https://doi.org/10.1108/JSM-03-2020-0090>
- Maulidiah, S., Muslim, S., Rauf, R., Yuslaini, N., Hayati, R., & Rahyunir, M. H. (2024). Strategi meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam perencanaan pembangunan di Negeri Kedah, Malaysia. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(3), 757–769. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v7i3.53430>
- Ng, M. K., & Wong, C. (2022). Spatial planning for smart sustainable development? *Planning Theory & Practice*, 23(5), 759–798. <https://doi.org/10.1080/14649357.2022.2139075>
- Nor, R., Gani, A. J. A., Saleh, C., & Amin, F. (2022). Organizational commitment and professionalism to determine public satisfaction through good governance, public service quality, and public empowerment. *International Review on Public and Nonprofit Marketing*, 19(1), 191–217. <https://doi.org/10.1007/s12208-021-00297-0>
- Ojiako, U., AlRaeesi, E. J. H., Chipulu, M., Marshall, A., & Bashir, H. (2024). Innovation readiness in public sector service delivery: An exploration. *Production Planning & Control*, 35(5), 437–460. <https://doi.org/10.1080/09537287.2022.2089266>
- Pangbourne, K., Mladenović, M. N., Stead, D., & Milakis, D. (2020). Questioning mobility as a service: Unanticipated implications for society and governance. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 131, 35–49. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2019.09.033>
- Pedersen, J. F., Egilstrød, B., Overgaard, C., & Petersen, K. S. (2022). Public involvement in the planning, development and implementation of community health services: A scoping review of public involvement methods. *Health & Social Care in the Community*, 30(3), 809–835. <https://doi.org/10.1111/hsc.13528>
- Perrini, F., Costanzo, L. A., & Karatas-Ozkan, M. (2020). Measuring impact and creating change: A comparison of the main methods for social enterprises. *Corporate Governance*, 21(2), 237–251. <https://doi.org/10.1108/CG-02-2020-0062>
- Rauf, R., Othman, Z., Maulidiah, S., Yuslaini, N., Hayati, R., & Rahyunir, M. H. (2024). Penguatan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas pemerintahan di Kampung Mukim Singkir Yan Kedah, Malaysia.

- Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 421–433.
<https://doi.org/10.24198/kumawula.v7i2.53429>
- Remillard, E. T., Campbell, M. L., Koon, L. M., & Rogers, W. A. (2022). Transportation challenges for persons aging with mobility disability: Qualitative insights and policy implications. *Disability and Health Journal*, 15(1, Suppl.), 101209. <https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2021.101209>
- Renukappa, S., Suresh, S., Abdalla, W., Shetty, N., Yabbati, N., & Hiremath, R. (2022). Evaluation of smart village strategies and challenges. *Smart and Sustainable Built Environment*, 13(6), 1386–1407. <https://doi.org/10.1108/SASBE-03-2022-0060>
- Rosenbloom, D. H., Kravchuk, R. S., & Clerkin, R. M. (2022). *Public administration: Understanding management, politics, and law in the public sector* (9th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003198116>
- Sabet, N. S., & Khaksar, S. (2024). The performance of local government, social capital and participation of villagers in sustainable rural development. *The Social Science Journal*, 61(1), 1–29. <https://doi.org/10.1080/03623319.2020.1782649>
- Syukri, M. (2024). Indonesia's new developmental state: Interrogating participatory village governance. *Journal of Contemporary Asia*, 54(1), 2–23. <https://doi.org/10.1080/00472336.2022.2089904>